

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barangbarang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.<sup>18</sup>

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan insfrakstruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suat negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan riil atau produk domestik bruto dalam jangka

---

<sup>18</sup> M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan.....*, Hal. 57

panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Beberapa pakar ekonomi telah melakukan penelitian secara terperinci tentang pertumbuhan ekonomi dalam modal serta pertumbuhan hasil produksi yang diuraikan dalam tiga sumber yang berbeda yaitu pertumbuhan dalam tenaga kerja (L), pertumbuhan dalam modal (K) dan pertumbuhan inovasi teknik.<sup>19</sup>

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dibawah ini merupakan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Menurut Ahli Ekonomi Klasik (Adam Smith, David Ricardo, TR Malthus, S Mill)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: Jumlah penduduk, Jumlah barang modal, Luas tanah dan kekayaan alam, Tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

- b. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod- Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai

---

<sup>19</sup> Jolyne Myrell Parera, *Agkomerasi Perekonomian di Indonesia*, (Malang: CV IRDH (Research & Publishing) Hal.13

pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut:

1. Barang modal telah mencapai kapasitas yang penuh
2. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional
3. Rasio modal-produksi (*Capital-Output ratio*) tetap nilainya
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramowitz dan Solow-pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

di mana,

$\Delta Y$  adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

$\Delta K$  adalah tingkat pertumbuhan modal

$\Delta L$  adalah tingkat pertumbuhan penduduk

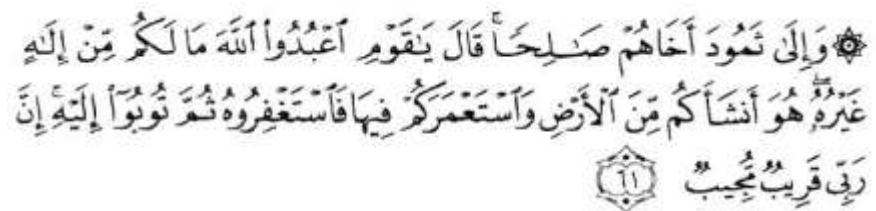
$\Delta T$  adalah tingkat perkembangan teknologi.

Sumbangan yang penting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan

empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup>

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam Klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT. Surat Hud Ayat 61:



Artinya : Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya tuhanku sangat dekat (rahmatnya) dan memperkenalkan (doa hambanya).<sup>22</sup>

Makna yang tersirat dari ayat tersebut adalah Allah SWT telah menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi pemakmuran bumi ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir :

Kata Ali: Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran

<sup>21</sup> Sadono Sukirno, *Makro ekonomi: Teori Pengantar makro ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hal. 433-437.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2013) Hal. 418

bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.<sup>23</sup>

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek urut dan membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.

Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materiil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan

---

<sup>23</sup>Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers) hal. 25-26

material di sunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut islam menyatu secara integral.<sup>24</sup>

#### 4. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tarigan, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai

tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto.<sup>25</sup>

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum. PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai

---

<sup>24</sup> Azwar Iskandar, Kajian Ekonomi dan Keuangan....., Hal.157

<sup>25</sup> Kuswantoro dan Indah Gianti Permata Dewi, Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 6 No. 1 April 2016*, Hal. 18-34

bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode.

## **B. Tenaga Kerja**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.<sup>26</sup>

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 1998 batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. BPS membagi tenaga kerja dalam tiga kelompok:

---

<sup>26</sup> Tim Redaksi Huta Publisher, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Publisher) Hal. 3

1. Tenaga kerja penuh adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja = 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja 0 = 1 jam dalam seminggu.<sup>27</sup>

Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup> Dari definisi di tersebut, dapat dipahamibahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (working age population).

---

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> Diakses pada Selasa 9 Februari 2021, Pukul 20.59

<sup>28</sup> Tambunan, *Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: BPFE 2002) Hal. 78

Sitanggang dan Nachrowi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja yang antara lain:

1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenagakerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.
2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.

## **2. Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan

yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal yaitu:

- a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor.
- b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.<sup>29</sup>

### 3. Teori Tenaga Kerja

Dibawah ini merupakan teori-teori tentang ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Teori Klasik Adam Smith

Adam smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>29</sup> Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga 2000)  
Hal. 89

Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimana pun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang.

Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah

lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marginal labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

c. Teori Harrod-domar

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.<sup>30</sup>

#### 4. Tenaga Kerja Dalam Islam

Ajaran Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam posisi yang terhormat karena Islam sangat mencintai seorang muslim yang gigih untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62:10) :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan sholat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

---

<sup>30</sup> Tenaga Kerja, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja) Diakses pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2020 Pukul 11.27

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “*Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain,*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup> Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati terlebih lagi adalah hubungan di antara para pengusaha dan juga para pekerja karena seseorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan seorang pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan.<sup>32</sup>

### **C. Investasi (Penanaman Modal)**

#### **1. Pengertian Investasi**

Investasi atau yang disebut dengan dengan penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.<sup>33</sup> Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.....,Hal. 554

<sup>32</sup> Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hal. 41

<sup>33</sup> Irna Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, ( Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia) Hal 23

ini memungkinkan perekonomian akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Selain itu, investasi dilakukan untuk mengganti barang modal yang telah rusak dan perlu didepresiasi.

Investor melakukan investasi bukan digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya, namun untuk mencari keuntungan. Hal tersebut yang menjadi tingkat keuntungan menjadi faktor penentu investasi. Menurut Sukirno, terdapat 5 faktor utama yang menentukan tingkat investasi, yakni:

- a. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh
- b. Tingkat bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
- d. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya
- e. Keuntungan yang diperoleh perusahaan

Iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dilengkapi melalui Undang-undang No. 11 tahun 1970 dan Undang-undang No. 12 tahun 1970. Selain itu guna menarik investor dikeluarkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang percepatan melaksanakan berusaha dan pedoman pelaksanaannya.

Investasi atau penanaman modal di Indonesia melalui skema Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negara akan mendorong pembangunan ekonomi. Harrod-Domar memberikan penilaian khusus terhadap investasi sebagai faktor khusus dalam peranannya terhadap proses pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan investasi memiliki 2 peran. Satu sisi investasi akan menciptakan pendapatan dan disisi lain investasi memperbesar kapasitas produksi dengan cara meningkatkan stok modal.<sup>34</sup>

## 2. Investasi Dalam Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan dikemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan

---

<sup>34</sup> M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan.....*, Hal. 229

kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia investasi ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Hasyr : 18.<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya....., Hal. 612

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

#### **D. Penanaman Modal Asing**

##### **1. Pengertian Penanaman Modal Asing**

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, yang menggunakan modal asing maupun modal bersama dengan modal dalam negeri. Menurut Prof Sonjariah mendefinisikan penanaman modal asing sebagai transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk tujuan menghasilkan keuntungan dibawah kontrol penuh atau parsial dari pemilik aset.<sup>36</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan No. 11 Tahun 1970 mendefinisikan Penanaman Modal sebagai:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang bukan bagian dari devisa
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri
- c. Bagian dari hasil perusahaan diperbolehkan ditransfer untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

---

<sup>36</sup> Raden Rijanto, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Sukabumi: Al Fath Zumar), Hal 100

Menurut Jingan dengan adanya penanaman modal asing akan mendorong kenaikan tingkat produktivitas, pendapatan, dan pekerjaan nasional yang dalam jangka panjang akan mengarah pada upah riil tenaga kerja yang meningkat. Selain itu juga dengan adanya penanaman modal produktivitas meningkat karena adanya transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga para tenaga kerja akan memiliki skill yang meningkat akan berdampak pada naiknya produktivitas tiap individu tenaga kerja. Keuntungan lain yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara penerima modal (*host country*) adalah pendapatan negara bertambah dari sektor pajak yang berasal dari keuntungan dan royalti perusahaan.<sup>37</sup>

## 2. Jenis-jenis Penanaman Modal Asing

Modal Asing dapat masuk dari negara surplus dana menuju negara defisit dana dapat dilakukan melalui dua pilihan, yakni investasi langsung atau investasi tidak langsung.<sup>38</sup>

### a. Investasi Langsung

Investasi langsung ini berarti negara penanaman modal secara *de facto* atau *de jure* melakukan pengawasan aset yang ditransfer di negara pengimpor modal. Investasi langsung dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni : pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal, pembentukan perusahaan dinegara pengimpor modal yang memiliki mayoritas saham, mendirikan

---

<sup>37</sup> M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan*....., Hal. 481-482

<sup>38</sup> Raden Rijanto, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Sukabumi: Al Fath Zumar), Hal 100

korporasi di negara penanam modal untuk cara khusus beroperasi dinegara lain, atau menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari berbagai negara penanaman modal.

b. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung atau lebih dikenal sebagai investasi portofolio yang sebagian besar terdiri dari penguasaan saham yang dikeluarkan pemerintah pengimpor modal. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan perusahaan, hanya mempunyai hak untuk deviden.

Penanaman modal secara langsung dinilai memiliki keuntungan yang lebih besar untuk negara pengimpor modal, antara lain:

- a. Investasi langsung memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi, dan organisasi yang mutakhir pada negara pengimpor modal
- b. Investasi langsung sebagian labanya ditanamkan kembali dinegara pengimpor modal dalam bentuk pengembangan atau modernisasi
- c. Kemungkinan pelarian modal dari negara dapat diminimalisir
- d. Pada tahap awal pembangunan, investasi asing langsung juga meringankan beban neraca pembayaran negara berkembang karena tenggang waktu pengoperasian dan perolehan laba akan sedikit lebih lama.

### 3. Teori Penanaman Modal Asing

Menurut Muchamad Ardiansyah dalam orasi ilmiahnya “ Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal”, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi. Adapun teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi, adalah:

a. Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*)

Teori ekonomi klasik dan Neo Klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi negara penerima modal. Pendapat yang sangat mendasar dari teori neo-klasik adalah bahwa penanaman modal asing khususnya negara berkembang, memainkan peran sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan pekerja, khususnya perusahaan multinasional yang dianggap sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan..

b. Teori Kebergantungan (*The Dependency Theory*)

Teori ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing.

c. Teori Penengah (*The Middle Path Theory*)

Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah

dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya.<sup>39</sup>

## **E. Penanaman Modal Dalam Negeri**

### **1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri**

Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian disingkat PMDN dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1997 didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1968 penanaman modal negeri didefinisikan sebagai bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta, yang disihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut keentuan Undang-undang.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal luar negeri dengan modal dalam negeri.

### **2. Teori Penanaman Modal Dalam Negeri**

Dibawah ini merupakan teori-teori tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, antara lain:

---

<sup>39</sup>Ardiansyah, Teori-teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal, <https://customslawyer.wordpress.com>, Diakses pada Hari Selasa 9 Februari 2021, Pukul 19.39

<sup>40</sup>Raden Rijanto, *Aspek Hukum*....., Hal 104

a. Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa

berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar.<sup>41</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi PMDN

Menurut Rowland, Terdapat lima faktor yang mempengaruhi jumlah realisasi PMDN, antara lain:

- a. Potensi dan karakteristik suatu daerah
- b. Budaya masyarakat
- c. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional
- d. Peta politik daerah dan nasional
- e. Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi

## F. Pengeluaran Pemerintah

### 1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirna pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daeran atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output,

---

<sup>41</sup> Irna Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia) Hal .24

maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>42</sup>

## 2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran adalah sebagai berikut:

### a. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

---

<sup>42</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi*....., Hal. 38

b. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

c. Teori batas kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak,

pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.<sup>43</sup>

### 3. Pengeluaran Pemerintah dalam Islam

Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam dan lain-lain.<sup>44</sup>

Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja dan pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi konvensional. Di konvensional terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu ideologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat.

Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran tidak terikat.

---

<sup>43</sup> Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik, Edisi 1, Cetakan Ke-1*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) Hal:36

<sup>44</sup> Lilik Rahmawati, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Islam, Wacana Politik Ekonomi Islam Vol 02 No. 01 2012*, Hal. 232

Pengeluaran yang terikat adalah dimana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan juga kebutuhan. Diantara ayat Al Quran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah Q.S At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ  
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketrentaman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>45</sup>

Ayat diatas juga menunjukkan adanya perintah untuk memungut zakat. Pemungutan ini tentunya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan syariat yang berlaku. Tidak dibenarkan seseorang yang merasa berhak menerima zakat mengambil harta orang kaya dengan cara ilegal (mencuri). Harta yang terkumpul dari zakat

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.....,Hal. 643

selanjutnya didistribusikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Al Qur'an Surat At-Taubah: 60.

#### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan, penulis bertitik tolak dari beberapa peneliti terdahulu khususnya penelitian yang berkaitan dengan tenaga kerja, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Lailatul Rizky. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data panel menggunakan data *cross section* dengan 33 provinsi di Indonesia dan data *time series* pada tahun 2010-2013. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal negeri dan belanja modal bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 33 provinsi di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini juga

menggunakan data sekunder. Sedangkan perbedaannya tidak menggunakan variabel tenaga kerja dalam penelitiannya.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Bimantoro. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan adalah data runtut waktu data kuartalan periode 2001-2013 yang terdiri dari data pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing langsung, tingkat inflasi, BI *rate* dan nilai tukar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Vector autoregresion* (VAR) yang merupakan data runtut waktu, yang mana setiap variabel endogen dijelaskan nilai lag nya dan lag variabel endogen lainnya. Estimasi model VAR mengharuskan data series harus stationer. Tetapi apabila data series tersebut non-stationer maka model *Vector Error Correction Model* (VECM) dapat digunakan dengan syarat data tersebut kointegrasi (mempunyai hubungan jangka panjang atau ekuilibrium). Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa Investasi langsung dari luar negeri merupakan salah satu variabel penting dalam mempercepat proses peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia. Investasi langsung luar negeri merupakan salah satu penggerak motor pertumbuhan ekonomi sejak masa pemerintahan orde baru hingga kini. Selain salah satu faktor ekonomi investasi langsung juga saling berpengaruh terhadap variabel makro penting seperti tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar dalam proses pertumbuhan ekonomi. Persamaan

---

<sup>46</sup> Reza Lilatul Rizky, Pengaruh Penanaman Modal....., Hal. 9-16

dengan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi dan data yang digunakan adalah data runtut waktu data kuartalan namun berbeda tahun penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah tidak menggunakan data tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri serta metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Vector autoregresion* (VAR).<sup>47</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Avicenna S Hidayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Pemerintah , Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Data-data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi model regresi, yakni *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), Dan *Random Effect* (REM). Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis data panel, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. Berdasarkan hasil analisis data panel dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah, tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Persamaan dengan penelitian ini adalah bersama-sama menguji pengaruh variabel tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun ruang lingkupnya berbeda jika dalam penelitian saya adalah ruang lingkup

---

<sup>47</sup> Fajar Bimantoro, Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Media Ekonomi Vol. 24 No. 1*, April 2016, Hal. 63-74

Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan ruang lingkup Jawa Timur. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Avicenna S Hidayat membahas mengenai belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah sedangkan dalam penelitian saya tidak membahas variabel tersebut.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisan dan Aris Soelistyo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik regional bruto di kabupaten provinsi kalimantan selatan 2011-2015. Data-data dalam penelitian ini diuji menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Dalam regresi data panel terdapat tiga teknik yang dapat digunakan dalam mengestimasi medel regresi, yakni *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), Dan *Random Effect* (REM). Untuk menentukan model yang tepat dalam analisis data panel, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. Berdasarkan hasil analisis data panel dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabutapen/kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 juga berpengaruh positif dan signifikan. Persamaam dengan penelitian ini adalah bersama-sama menguji pengaruh variabel Penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah

---

<sup>48</sup> Avicenna S Hidayat, Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah , Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15 No. 01 Juni 2017*, Hal 71-86

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan perbedaannya tidak ada pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Herman Kumbono dan Elyzabet Indrawati Marpaung, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data *time series* makro ekonomi Indonesia pada tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi domestik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi dalam penelitian ini adalah perlunya peran pemerintah sebagai regulator untuk mendukung peningkatan investasi asing dan investasi domestik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, sedangkan perbedaannya adalah tidak meneliti tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah.<sup>50</sup>

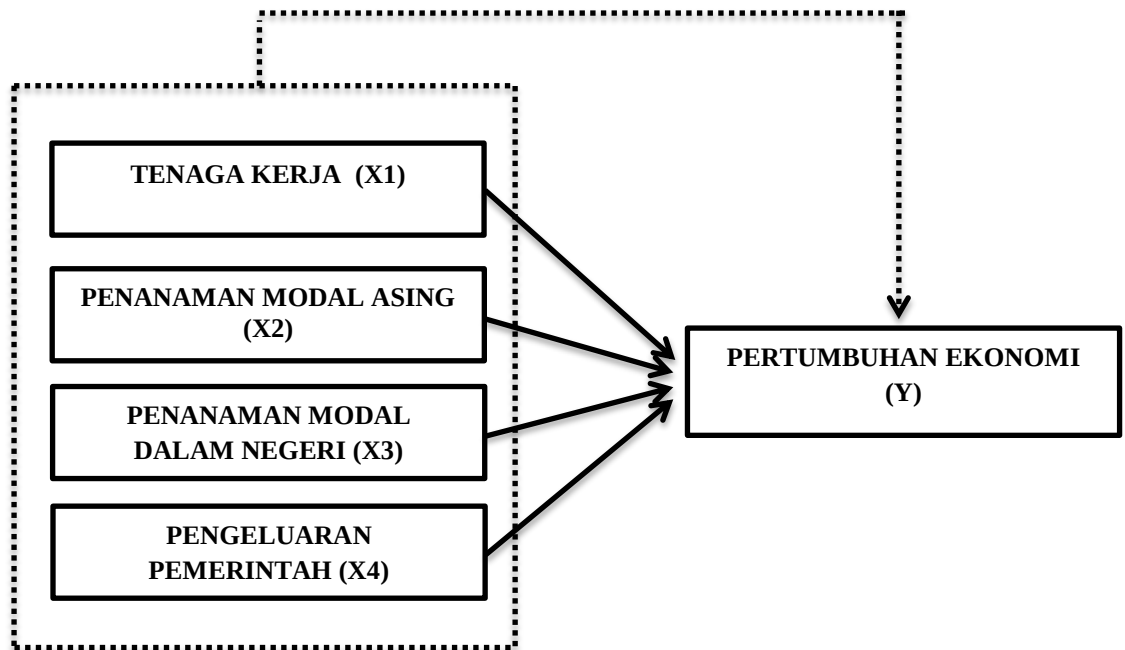
---

<sup>49</sup> Kairunnisa dan Aris Soelistyo, Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Domestik Serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1 Jilid 4*, 2017, Hal.482-498

<sup>50</sup> Herman Kumbono dan Elyzabet Indrawati Marpaung, Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha* Vol 12 No 1, 2020 Hal. 137-14

## H. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan :



= Pengaruh secara Parsial



= Pengaruh secara Simultan

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Tenaga kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia secara Parsial maupun Simultan.

## **I. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Sehingga dalam hipotesisnya yang bersifat asosiatif adalah ada hubungan secara signifikan antara Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pengkajian dilakukan dengan mengambil data dari tahun 2015-2019.

Berikut hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini:

1. H1 : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
2. H2 : Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
3. H3 : Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
4. H4 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
5. H5 : Tenaga Kerja, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.